



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 21 (dua puluh satu)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
Hari, Tanggal	: Selasa, 6 September 2022
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Aria Bima dan dilanjutkan oleh M.Sarmuji., S.E., M.Si/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: 1. Pembahasan RKAKL Tahun Anggaran 2023; 2. Pembahasan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022; 3. Program dan Evaluasi pelaksanaan BPUM; 4. Progres penyaluran dana bergulir Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Tahun Anggaran 2023; dan 5. Proses Penanganan Koperasi bermasalah.
Hadir	: 1. 43 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Koperasi dan UKM, saudara Teten Masduki Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM pada pukul 10.38 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 6 September 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M Sarmuji, SE., MSi.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyetujui penjelasan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1.407.517.242.000 (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan perincian pagu per program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp390.581.596.000 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*)
 - b. Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1.016.935.646.000 (*Satu Triliun Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*)
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI untuk meningkatkan realisasi Anggaran 2022 mengingat realisasi anggaran baru 44.26% dari total pagu Rp1,260,728,863,000 (*Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dengan memperhitungkan pagu anggaran setelah kebijakan *Automatic Adjustment (AA)*.
3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI untuk segera menyiapkan database UMKM yang belum mendapatkan BPUM secara akuntabel dalam mengawal pengajuan usulan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2022.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program BPUM sehingga terlihat kemanfaatan program tersebut.

5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk meningkatkan pengawasan penyaluran seluruh bantuan yang menjadi program Kementerian Koperasi dan UKM.
6. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dalam capaian realisasi penyaluran Dana Bergulir Tahun Anggaran 2022 mengingat realisasi anggaran baru mencapai 63,46% dari target penyaluran sebesar 1,8 Triliun dan memastikan strategi yang tepat dalam penyaluran Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2 Triliun.
7. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk lebih proaktif dalam mengawal penyelesaian koperasi bermasalah dan meningkatkan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam.
8. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk dapat membuat program dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM terhadap UMKM dan Nelayan.
9. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.52 WIB.

MENTERI KOPERASI DAN UKM

Ttd.

TETEN MASDUKI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**M. SARMUJI., S.E., MSi
A-318**